

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PELAKSANAAN FUNGSI KOORDINASI CAMAT DALAM KEGIATAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BALAI JAYA KABUPATEN
ROKAN HILIR

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Program Studi
Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Islam Riau*



INDRA LESMANA
NPM : 177110167

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU

2022

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSOAL DAN POLTIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Indra Lesmana
NPM : 177110167
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Camat Dalam Kegiatan PEMBERDAYAAN Masyarakat Di Kecamatan Balai jaya Kabupaten Rokan Hilir

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif,

Turut Menyetujui
Program Studi Administrasi Publik Ketua,

Pekanbaru, 10 Agustus 2022
Pembimbing,

Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

Drs. Parjiyana, M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Indra Lesmana
NPM : 177110167
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Balai jaya Kabupaten rokan Hilir

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah oleh karena itu tim penguji komprehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Srata Satu Bidang Ilmu-Ilmu Sosial.

Pekanbaru, 30 Agustus 2022

Ketua

Sekretaris

Drs. Parjiyana, M,Si

Andri Kurniawan, B.PM., M.Si

Anggota

Mengetahui,
Wakil Dekan 1

Kartius, S.Sos., M.Si

Indra Safri, S.Sos., M.Si



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Indra Lesmana
NPM : 177110167
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan korektif dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 30 Agustus 2022
An. Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Drs. Parjiyana, M.Si

Andri Kurniawan, B.PM., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan 1

Turut Menyetujui
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Kartius, S.Sos., M.Si

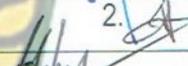
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 0802/UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 24 Agustus 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 25 Agustus 2022 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Indra Lesmana
NPM : 177110167
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir**

Nilai Ujian : Angka : "70.6" ; Huruf : "B"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Parjiyana, M.Si.	Ketua	1. 
2.	Andri Kumiawan, B.PM., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Kartius, S.Sos., M.Si	Anggota	3. 
4.	Herman, S.Sos., M.Si	Notulen	4.

Pekanbaru, 25 Agustus 2022
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaniirrohim.....

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis merasa sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah diberikan Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”**.

Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suritauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat, dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan Skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafriadi, SH, MCL yang telah menyediakan fasilitas yang membuat belajar menjadi nyaman dan selalu menjadi motivator untuk menyelesaikan studi.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menjadi motivator penulis untuk menyelesaikan studi.

3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos.,M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik yang selalu turut memberikan pengarahan kepada penulis dan membimbing penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Bapak Eko Hendrian, S.sos.,M.Si selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik, yang juga turut memberikan motivasi serta membimbing penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Ibu Ema Fitri Lubis, S.Sos.,M.Si selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktu dan fikirannya sehingga penulis bias menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan baik.
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu selama mengikuti perkuliahan pada Program Studi Administrasi Publik.
7. Seluruh staf, karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dan serta Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi ini.
8. Kepada Ayahanda Jakiman dan Ibunda Suarni tercinta atas segala doa bantuan, bimbingan, dorongan serta doa restu yang diberikan kepada penulis selama penyusunan. Dan terimakasih kepada abang dan kakak tersayang yang telah memberikan motivasi, semangat serta dorongan yang diberikan kepada penulis.

9. Kepada Teman-teman kelas AP D terutama untuk para sahabatku Ayu Ningrum , Amelia, Rezty Mulyani, Siska Putriani, Nanda Putri, Nadya Wulandari, Nadya Agustin, Gunawan, Arif Budiman, Bayu Fembari, Guntur Suardi Putra, Jaka Taufik Hidayat, M. Rafli Febriansyah, Yogi Ansyah, Fitra Panjaitan, Dewana Gaga, Andik damanik, Dani Ramadhan, Agus Siregar, jafar sodiq, yogi dan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu semuanya yang selalu membuat hari-hari perkuliahan menjadi menyenangkan

10. Dan tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada seluruh teman teman seperjuangan jurusan Administrasi Publik angkatan 2017 terkhusus kelas AP D yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi nusa, Bangsa dan dapat menambah khsanah cakrawala pemikiran bagi para pembaca.

Pekanbaru, 10 Agustus 2022

Penulis

Indra Lesmana

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	18
A. Studi Kepustakaan.....	18
1. Konsep Administrasi.....	18
2. Konsep Organisasi.....	21
3. Konsep Manajemen.....	23
4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia	25
5. Konsep Koordinasi.....	27
6. Konsep fungsi	29
7. Konsep Pemberdayaan Masyarakat.....	29
B. Kerangka Pikir.....	31
C. Konsep Operasional.....	33
D. Hipotesis	33

E. Operasional Variabel.....	35
F. Teknik Pengukuran.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Tipe Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Populasi dan Sampel	42
D. Teknik Penarikan Sampel	43
E. Jenis dan Sumber Data	44
F. Teknik Pengumpulan Data.....	45
G. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	47
A. Gambaran Umum Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir	47
B. Struktur Organisasi Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.....	49
C. Gambaran Umum Kecamatan Balai Jaya	58
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	60
A. Identitas Responden	60
1. Jenis kelamin.....	60
2. Kelompok umur.....	61
3. Tingkat Pendidikan	62
B. Hasil Pembahasan Penelitian	63
C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	79
BAB VI PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR KEPUSTAKAAN	83
LAMPIRAN.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.I	: jumlah penduduk kecamatan balai jaya	9
I.2	: pegawai berdasarkan pangkat dan golongan.....	10
I.3	: Program dan kegiatan yang di anggarkan dalam APBDES desa lubuk jawi tahun 2020	12
II.1	: operasional variabel pelaksanaan fungsi koordinasi camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	37
III.1	: populasi dan sampel	37
V.1	: Jumlah Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin	60
V.2	: Jumlah Identitas Responden Menurut Kelompok Umur	61
V.3	: Jumlah Identitas Responden Menurut Tingkat Pendidikan.....	62
V.	: Frekuensi Tanggapan Responden Tentang perencanaan terhadap pelaksanaan fungsi koordinasi camat dalam kegiatan pemberdayan masyarakat	66
V.5	: Frekuensi Tanggapan Responden Tentang pembagian kerja terhadap pelaksanaan fungsi koordinasi camat dalam kegiatan pemberdayan masyarakat.....	68
V.6	: Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Komunikasi terhadap pelaksanaan fungsi koordinasi camat dalam kegiatan pemberdayan masyarakat.....	71
V.7	: Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Pertemuan terhadap pelaksanaan fungsi koordinasi camat dalam kegiatan pemberdayan masyarakat.....	74
V.8	: Rekapitulasi pelaksanaan fungsi koordinasi camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan balai jaya kabupaten rokan hilir	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar II.1 : Kerangka Pikir Pelaksanaan Fungsi koordinasi Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.....	32
Gambar VI.1 : struktur kecamatan balai jaya	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

- 1 : Dokumentasi Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi koordinasi Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.....97
- 2 : Daftar Kusioner Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi koordinasi Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir102
- 3 : Daftar Wawancara Tentang Pelaksanaan Fungsi koordinasi Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir108
- 4 : Data Telly Penelitian Tentang Pelaksanaan Fungsi koordinasi Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir113
- 5 : Surat Permohonan Rekomendasi Riset Dari Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.....115
- 6 : Surat Rekomendasi Riset Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP RIAU)116
- 7 : Surat Rekomendasi dari Kantor Camat Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.....117
- 8 : Surat Keputusan Dekan Fisipol Universitas Islam Riau Tentang Penetapan Dosen Pembimbing118
- 9 : Surat Plagiasi Dari Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik119

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konfrehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : Indra Lesmana
Npm : 177110167
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Sastra Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah – kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan pernyataan administrasi, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya melanggar dan belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan akan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Agustus 2022

Pelaku pernyataan

INDRA LESMANA

**PELAKSANAAN FUNGSI KOORDINASI CAMAT DALAM KEGIATAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BALAI JAYA
KABUPATEN ROKAN HILIR**

Oleh:

Indra Lesmana

NPM: 177110167

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir beserta Hambatannya. Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif . yaitu definisi, pengukuran data Kuantitatif dan statistic objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang pada penduduk yang di minta menjawab sejumlah pertanyaan tentang survey untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dinilai Cukup Terlaksana. Artinya sebagian dari Indikator masih belum terlaksana dengan maksimal, di karenakan masih kurangnya Koordinasi antara instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Camat dinilai masih kurangnya pemberian informasi mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga masih banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut. Hambatan Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Camat Dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir yaitu dalam Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat kurang terkoordinasi dengan baik antara masyarakat dengan pihak-pihak Kecamatan maupun aparaturnya desa sehingga masyarakat desa kurang mengetahui mengenai berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dan jauhnya jarak Kecamatan dengan kepenghuluan terlalu jauh dan akses jalan juga cukup menghambat kegiatan Pemberdayaan Masyarakat tersebut

Kata Kunci: Koordinasi, Pemberdayaan Masyarakat, Camat

**IMPLEMENTATION OF THE SUBDISTRICT COORDINATION
FUNCTION IN COMMUNITY EMPOWEMENT ACTIVIESIN THE
SUBDISTRICT BALAI JAYA DISTRICTS ROKAN HILIR**

By:

Indra Lesmana

NPM: 177110167

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the subdistrict coordination function in community empowerment activities in the subdistrict Balai Jaya district Rokan Hilir along with the obstacles. This research uses quantitative methods, namely definitions, measurements, quantitative data and objective statistics through scientific calculations derived from sample of people in the population who are asked to answer a number of questions about surveys to determine the frequency and percentage of their responses. The result of the study indicate that : the implementation of the subdistrict coordination function in community empowerment activities in the subddistrict Balai Jaya districts Rokan Hilir is considered quite accomplished. this means that some of the indicators have not been implemented opyimally, because there is still a lack of coordination of community empowerment activities, Camat it is considered that there is still a lack of information regarding community empowerment activities so that there are still many from the community empowerment activities so that there are still many people who do not know about these activities. Obstacles to the implementation of the subdistrict coordination function in community empowerment activities in the sub district Balai Jaya district Rokan Hilir namely in the implementation of community empowerment activities, it is not well coordinated between the community and the subdistrict and village officials so that the village community does not know about various community empowerment activities. And the distance between the subdistrict and the penghuluan is too far and the road acces is also quite hindering the community empowerment activities.

Keyword: Coordination, Community Empowerment, Camat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi seluas-luasnya, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan khususnya serta potensi dan keragaman daerah. Melalui otonomi seluas-luasnya, pemerintah daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggungjawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Administrasi merupakan salah satu cabang ilmu social, administrasi juga sebagai salah satu fenomena atau ciri masyarakat modern, secara eksplisit tergambar administrasi yaitu suatu bentuk daya upaya manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi. Keseluruhan proses administrasi yang bertitik tolak dari manusia, berorientasi pada manusia, dimaksudkan untuk kepentingan manusia dan diakhiri oleh manusia pula, oleh karenanya dalam menganalisa administrasi, manusia perlu mendapatkan perhatian yang utama.

Seperti yang dimaksudkan Nawawi (dalam Syafie, 2003:5), administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Artinya administrasi merupakan suatu proses dalam melakukan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan bersama. Administrasi tidak terlepas dari organisasi, yang merupakan suatu wadah bagi pemerintah untuk melaksanakan aktivitas kerjasama yang memanfaatkan sumber daya yang telah ada menggunakan metode-metode tertentu dalam mencapai tujuan yang diharapkan .

Massie (dalam Zulkifli, 2009;14) mengatakan organisasi merupakan suatu kerjasama kelompok orang yang membagi tugas-tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyatukan aktivitas-aktivitas kearah percapaian tujuan bersama. Artinya organisasi merupakan sebuah wadah yang didalamnya terdapat orang-orang yang ingin melakukan suatu kegiatan yang telah direncanakan.

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Manajemen adalah alat atau wadah untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Secara umum manajemen bisa diartikan sebagai seni dan ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola manusia dan materil untuk mencapai tujuan . Sebagai alat pelaksana dari administrasi, manajemen diperlukan agar tujuan organisasi bisa dicapai sesuai dengan yang di rencanakan

Menurut Siagian (dalam Burhanuddin 2015;22) manajemen dapay didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggara berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajemen untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan.

Koordinasi adalah salah satu fungsi manajemen yang terkadang banyak para ahli memisahkan atau menyatukannya menjadi fungsi atau bukan fungsi dalam manajemen tetapi tetap menjadi satu-kesatuan dalam administrasi itu sendiri.

Kemudian menurut Hasibuan (2011;85) berpendapat bahwa koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Artinya koordinasi merupakan suatu kegiatan yang sudah terstruktur dalam unsur manajemen yang bersifat *top down*.

Maka dapat dilihat koordinasi merupakan salah satu kegiatan untuk mencapai segala tujuan organisasi yang mana menyatakan kegiatan-kegiatan tersebut,

berkomunikasi kepada semua anggota organisasi tersebut, maka dari itu koordinasi sangatlah perlu. Kajian administrasi publik ialah tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Salah satu kegiatan untuk mencapai tujuan Negara ialah pembangunan baik dipusat maupun daerah hingga ketingkat desa sekalipun.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan pemerintah dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan serta kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Soetomo (2011:69) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat terutama masyarakat lokal untuk mengelola proses pembangunannya. Sehingga dengan melakukan pemberdayaan oleh pemerintah, masyarakat dapat membangun kehidupannya. Artinya pemberdayaan masyarakat merupakan suatu praktik pemberian kesempatan besar kepada masyarakat lokal untuk memanager sebuah pembangunan.

Salah satu tugas pokok Camat sebagai pemimpin Kecamatan adalah melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat pada wilayah Kecamatan yang meliputi dorongan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh unit kerja yang mempunyai program dan kegiatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan, melakukan evaluasi, berbagai program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan, sehingga dapat diketahui bahwa

Camat dapat melakukan salah satu fungsi pemerintah yaitu pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat di Kecamatan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan bahwa pelaksanaan program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan adalah berada dalam koordinasi oleh camat dalam kedudukan/statusnya selaku kepala Wilayah kerja Kecamatan. dengan demikian camat mempunyai peranan penting dalam pemberdayaan masyarakat di Wilayah kerja Kecamatan.. Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa oleh camat diperlukannya peran serta aktif dari masyarakat guna mendorong perencanaan pemberdayaan melalui forum musyawarah pembangunan di desa, misalnya dalam pembuatan kebijakan yang ada di desa camat sebagai kepala wilayah di kecamatan mendampingi setiap kepala desa baik dalam pembuatan kebijakan atau peraturan desa. Terlebih saat ini disalurkan dana desa yang di salurkan oleh pemerintahan pusat demi menunjang kegiatan pembangunan serta pemberdayaan yang ada di desa. Sebagaimana diketahui bahwa fungsi koordinasi berkenaan dengan upaya mengarahkan, menyeimbangkan, menyatupadukan, menyelaraskan, mengsinkronisasikan, menghubungkan kegiatan dari orang-orang, kelompok orang atau satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi atau antar organisasi-organisasi sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi teratur, tertib, lancar, dan mencapai tujuan secara efisien dan efektif Sugandha, 1998 (Ndraha 2012:250).

Camat harus mampu melakukan segala tugas pokok dan fungsi-fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu tugas dan fungsi kecamatan yang tertuang dalam peraturan Pemerintahn Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang tugas, fungsi dan kewenangan kecamatan yaitu mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kewenangan ini sekaligus menjadi kewenangan Camat yang bersifat delegatif. Dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, pemerintah kecamatan dituntut untuk dapat bekerjasama dengan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar pemberdayaan yang dilakukan pemerintah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Camat sebagai ujung tombak pemerintah daerah secara jelas dalam UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 126 ayat (3) tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa camat menjalankan tugas umum pemerintahan yang dalam pembahasan di atas disebut sebagai kewenangan atributif. Camat diharapkan mampu melihat potensi wilayah yang dimiliki dan ikut bertanggungjawab dan bertugas dalam hal kemajuan masyarakat dan lingkungan wilayah kerjanya. Adapun Tugas dan Fungsi Camat antara lain:

- Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, camat mempunyai fungsi:

- a. Pengorganisasiaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pengorganisasiaan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pengorganisasiaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengorganisasiaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Pengorganisasiaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan.
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah kelurahan.
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah kelurahan.
- h. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- j. Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada walikota melalui sekretaris daerah kota sesuai standar yang diterapkan.

Mengingat Camat selaku kepala pemerintahan atau kepala wilayah dan camat sebagai pegawai negeri pusat yang diperbantukan di wilayah kecamatan, camat dituntut harus mampu mengelola pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan, sehingga pembangunan dapat dinikmati oleh rakyat, dan pemberdayaan yang

dilakukan baik dalam mengasah kemampuan skil berusaha dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat desa. Tentunya camat harus dinamis dan kreatif dalam menggerakkan para aparatnya secara berkesinambungan, dimana para aparat mampu menjadi aparatur pemerintah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Karena kepemimpinan Camat sangat menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan dan pemberdayaan di desa di wilayah kecamatan.

Lalu dalam peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan pada pasal 4 ayat 2 poin d yaitu pengkoordinasian pembangunan yang meliputi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta pemberdayaan masyarakat.

Kecamatan Balai Jaya merupakan salah satu kecamatan yang baru dimekarkan berdasarkan peraturan Daerah Rokan Hilir nomor 9 tahun 2014. Kecamatan Balai Jaya terdapat di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dimana secara Geografis Kecamatan Balai Jaya berada pada jalur lintas timur Sumatera yang memiliki peran penting sebagai lalu lintas dan sumber ekonomi sekaligus pendapatan bagi masyarakat.

Kecamatan Balai Jaya memiliki 11 (sebelas) Kepenghuluan / Kelurahan yang terdiri dari 9 (Sembilan) Kepenghuluan dan 2 (dua) kelurahan dengan jumlah penduduk 48.293 Jiwa dengan 14.257 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari 24.456 Jiwa penduduk laki-laki dan 23.837 Jiwa penduduk perempuan yang berdomisili di :

1. Kelurahan Balai Jaya Kota	: 7.635 Jiwa
2. Kelurahan Balam Sempurna Kota	: 4.359 Jiwa
3. Kepenghuluan Balai Jaya	: 5.246 Jiwa
4. Kepenghuluan Balam Sempurna	: 10.406 Jiwa
5. Kepenghuluan Pasir Putih	: 4.886 Jiwa
6. Kepenghuluan Kencana	: 2.035 Jiwa
7. Kepenghuluan Lubuk Jawi	: 2.131 Jiwa
8. Kepenghuluan Balam Bhakti	: 1.638 Jiwa
9. Kepenghuluan Pasir Putih Utara	: 2.399 Jiwa
10. Kepenghuluan Pasir Putih Barat	: 1.947 Jiwa
11. Kepenghuluan Balam Jaya	: 5.611 Jiwa

Tabel I.1 : Daftar jumlah penduduk Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir pada Tahun 2020

NO	KELURAHAN/ KEPENGHULUAN	JUMLAH PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L +P
1	Balai Jaya Kota	3.874	3.761	7.635
2	Balam Sempurna Kota	2.246	2.113	4.359
3	Balai Jaya	2.639	2.607	5.246
4	Balam Sempurna	5.297	5.109	10.406
5	Pasir Putih	2.441	2.445	4.886
6	Kencana	1.032	1.003	2.035
7	Lubuk Jawi	1.086	1.045	2.131
8	Bagan Bhakti	808	830	1.638
9	Pasir Putih Utara	1.244	1.155	2.399
10	Pasir Putih Barat	906	1.041	1.947
11	Balam Jaya	2.883	2.728	5.611
TOTAL		24.456	23.837	48.293

Sumber : (BPS) Buku Kecamatan Balai Jaya Dalam Angka Tahun 2020

Sebagai realisasi pelaksanaan pasal 126 Undang-Undang Noor 12 Tahun 2004, tentang tugas dan wewenang sebagai Aparatur Pemerintah Daerah dan Keputusan Bupati Rokan Hilir tentang pelimpahan sebagian Kepala Daerah kepada Camat, serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dengan kepala UPT Dinas Instansi di Tingkat Kecamatan dan Desa dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum dan penegakan perundang-undangan serta pelayanan masyarakat.

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor ; 29 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dipimpin oleh Camat yang mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah dan pembantuan .



Adapun jumlah personil Kecamatan Balai Jaya sejumlah 18 pegawai Negara Sipil dan 9 penghulu.

TABEL 1.2 PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN

NO	NAMA	JABATAN/PANGKAT/GOLONGAN
1	SAMUHIR, S.Pd	CAMAT BALAI JAYA
2	JUNAIDI, A.P	SEKRETARIS CAMAT BALAI JAYA

NO	NAMA	JABATAN/PANGKAT/GOLONGAN
1	SUYANTO, A.Ma.Pd	KASI PEMERINTAHAN
2	HARUN AL RASYID, S.sos	LURAH
3	HARTONO HARI KUSUMO, AMK	KASI PELAYANAN UMUM
4	TUMPAL SIBURIAN, A.Ma.Pd	SEKLUR
5	ILHAM	KASI KESRA
6	UCOK, ST	LURAH
7	ZAINUL ARIFIN,SE	KASI PEMBANGUNAN
8	BERLIAMSYAH DAMANIK	KASI TRANTIB
9	JUREMI, A.ma	SEKLUR
10	EKA ISKANDAR	KASUBBAG KEPEGAWAIAN
11	RURI HESTITI, S.IP	Plt.KASUBBAG PERENCANAAN KEUANGAN DAN PROGRAM
12	RIKE TRY ASTUTI, S.IP	STAF KANTOR CAMAT
13	JAFET CHANDRA SARAGIH	STAF KANTOR CAMAT
14	RIZA IRAWAN LUBIS	STAF KANTOR CAMAT
15	JUNAIDI	STAF KANTOR CAMAT
16	AGUS SUPARMAN	STAF KANTOR CAMAT

Sumber : (BPS) Buku Kecamatan Balai Jaya Dalam Angka Tahun 2019

TABEL 1.3 Program Pemberdayaan Masyarakat Yang Di Anggarkan dalam APBDes Desa Lubuk Jawi pada tahun 2020

No	Program Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan APBDes Desa Lubuk Jawi pada tahun 2020	
	Jenis Program	Anggaran
1.	Kegiatan BBGRM	5.000.000
2.	Pembinaan Karang Taruna	20.000.000
3.	Pembinaan PKK	10.000.000
4.	Pembinaan LPM	13.000.000
5.	Pemberdayaan Imam, gharim, Guru Mengaji	7.800.000
6.	Pelatihan Pengelolaan BUMDES	6.600.000
7.	Pelatihan tata kelola BUMDES	6.000.000
TOTAL		68.400.000

Di tahun 2020 BUMDES desa Lubuk Jawi membuat suatu usaha dari dana BUMDES yaitu membuat suatu Usaha berbentuk Cafe. Sedangkan di desa Lubuk Jawi sudah ada beberapa usaha bentuk café milik warga sendiri. Dengan adanya Café yang di buat dari dana desa. Itu bisa membuat usaha café warga Desa Lubuk Jawi mengalami penurunan pemasukan, dikarenakan semakin banyaknya pesaing usaha tersebut. Seharusnya Dana dari BUMDES harus membuat sesuatu yang lebih menguntungkan bagi warga kalangan bawah. Ataupun membuatkan usaha buat kalangan bawah tanpa mengganggu usaha milik orang lain.

Sedangkan bentuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan-pelatihan yang di berikan untuk masyarakat tidak ada, seharusnya harus ada pelatihan-pelatihan yang di berikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dimana sasaran dari kegiatan diharapkan masyarakat mampu memanfaatkan kemauan yang di dapatkan untuk membuka usaha sendiri serta menjadi lebih mandiri .

Di tahun 2020 Kecamatan Balai Jaya juga memberikan bantuan sosial Covid. Jenis bantuannya berupa Beras, Gula, Minyak Goreng. Kepada masyarakat-masyarakat miskin di Kecamatan Balai Jaya. Sebanyak 736 Jiwa. Kecamatan Balai Jaya juga memberikan bantuan berupa, Bantuan pangan dan Tunai. Bantuan Sosial Tunai niali bantuan nya 300.000 ribu anggaran dari kementerian sosial di salurkan melalui kantor pos yang menerima sebanyak 1.028 Jiwa.

Penerima PKH sejatinya adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) karena PKH sendiri adalah Program Kemiskinan yang paling bawah pasalnya setiap penerima PKH berhak mendapatkan bantuan-bantuan lain contohnya bantuan beras bulog, kartu Indonesia Pintar dan kartu Indonesia Sehat. Jadi penerima PKH sendiri haruslah orang yang paling miskin dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial Indonesia tetapi yang terjadi di lapangan sendiri penerima manfaat itu masih ada tergolong di keluarga yang masih tercukupi. Sedangkan keluarga yang kriteria nya tidak mampu masih ada saja yang tidak menerima bantuan tersebut. Dengan kata lain program ini belum tepat sasaran. Program ini harusnya

mampu menurunkan tingkat kemiskinan pada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Namun fenomena di lapangan justru berbeda dari yang di harapkan. Masalah kelembagaan serta masalah teknis malah cenderung menjadi masalah utama sehingga pencapaian tujuan dari adanya PKH tidak berjalan secara efektif.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparat pemerintah Kecamatan Balai Jaya dalam berbagai sektor pelayanan terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat (seperti pelayanan KK, KTP, Akta kelahiran dan sebagainya) masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengaduan ataupun keluhan dari masyarakat. Dari hasil observasi dilapangan yang mengungkapkan keluhan masyarakat berupa keberatan terhadap biaya biaya pengurusan KTP di Kecamatan Balai jaya. Fakta lainnya adalah hasil laporan Observasi lapangan yang menyimpulkan bahwa pengelolaan produk layanan penerbitan KTP oleh kecamatan Balai Jaya tahun 2020 belum optimal, hal ini terbukti dari data 23.035 wajib KTP, hanya 6.526 atau 28,20% penduduk memiliki KTP. Fakta lainnya menyebutkan bahwa untuk pencetakan KTP masyarakat Kecamatan Balai Jaya harus pergi ke Kecamatan Bagan Sinembah dikarenakan di Kecamatan Balai Jaya belum ada tempat pencetakan KTP.

Pengaduan lainnya seperti menyangkut prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit dalam pengurusan, tidak transparan, kurang informative, kurang akomodatif, kurang konsisten, terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu dan biaya)

serta masih dijumpai praktek pungutan liar serta tindakan-tindakan yang berindikasi penyimpangan dan KKn(Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Menurut peneliti berdasarkan survey dilapangan sosialisasi mengenai kegiatan pemberdayaan belum dilakukan secara berkala kepada masyarakat. Dan masalah lain yang ditemukan di desa yaitu kurangnya pengetahuan aparatur Desa di bidang teknologi dan informasi dan berdampak pada kurangnya kualitas aparatur desa. Karena latar belakang pendidikan aparatur desa yang ada di Kecamatan Balai Jaya sebagian besar tamatan SMA yang mana mereka dapat bekerja di kantor Desa karena ada kerabat yang bekerja disana atau karena ada orang dalam.

Dari pemaparan latar belakang di atas serta hasil prasurey yang penulis lakukan, dapat diketahui fenomena yang terjadi yaitu :

1. Belum tercapainya tujuan PKH di Karenakan penerima PKH sejatinya adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), tetapi masih ada saja penerima PKH dari keluarga yang berkecukupan. Program ini tidak tepat sasaran dikarekan masih ada saja Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang tidak menerima bantuan tersebut.
2. Belum tercapainya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Sosial di karenakan masih ada masyarakat yang kurang mampu yang tidak menerima bantuan dari kegiatan tersebut.

3. Kurang terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pelayanan Umum terbukti dengan pengelolaan produk layanan penerbitan KTP oleh Kecamatan Balai Jaya tahun 2020 belum optimal, hal ini dapat dilihat dari data 23.135 wajib KTP, hanya 6.526 atau 28,20% penduduk memiliki KTP.

Dari fenomena yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”**.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari fenomena sebagaimana ditentukan dan telah dijelaskan diatas maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

“ Bagaimanakah Pelaksanaan Fungsi koordinasi Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat bagi kepentingan Akademis, pengembangan ilmu administrasi khususnya Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Camat dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Balai jaya Kabupaten Rokan Hilir dalam bentuk penelitian langsung di lapangan. Disamping itu, hasil penelitian dapat semakin memperluas wawasan teori peneliti.
- b. Manfaat praktis, diharapkan dapat menjadi salah satu inspirasi bagi pimpinan organisasi dalam mengambil kebijakn-kebijakan untuk meningkatkan produktivitas kerja pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.
- c. Manfaat bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan kajian bagi peneliti yang berminat tentang topic penelitian ini. Baik dengan teknik pengelolaan yang sama tapi objek yang berbeda, atau objek yang sama dengan pengelolaan berbeda, maupun kombinasinya. Juga dapat dijadikan bagi keperluan analisis yang lebih mendalam dan detail.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori dalam penelitian, agar dapat diketahui bagaimana hubungan dan dimana posisi dan pengetahuan yang telah ada, perlu adanya ulasan terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan topic masalah yang diangkat untuk memungkinkan pembacaan mengingat cakrawala dari segi tujuan dan hasil penelitian.

1. Konsep Administrasi

Secara terminologi apa yang di sebut Administrasi adalah mengatur, mengurus, mengelola. Jika dibubuhi oleh awalan pe dan akhirnya an pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan apalagi pengaturan adalah terciptanyaketeraturan dalam susunan dan pengaturan dinamikanya.

Administrasi sebagai objek studi ilmu administrasi merupakan fenomena masyarakat modern, dalam arti sempit menurut Sadikin dan Darmadi (2011;4) administrasi merupakan penyusunan dan pencatatan data informasi secara sistematis serta untuk memudahkan memperolehnya kembali.

Menurut Helbert A. Simon (dalam Syafii 2016;10), Administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

Menurut Leonard B. White,(dalam Syafii 2016; Adminstrasi adalah suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun ukuran kecil.

Menurut Prajudi Atmosudirjo, Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu di dsalamasyarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi, barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, di situ terdapat administrasi.

Menurut The Liang Gie, Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.

Menuurut Sondang P. Siagian, Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah di ambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Hadari Nawawi, Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Definisi para ahli tentang administrasi ini sangat banyak sehingga tidak perlu lagi penulis sajikan satu per satu, karena pada prinsipnya mempunyai pengertian yang sama, yaitu antara lain:

- a. Kerja sama,
- b. Banyak orang, dan
- c. Untuk mencapai tujuan bersama

Pengertian di atas dimaksudkan sebagai administrasi dalam arti luas, sedangkan pengertian dalam arti sempit adalah administrasi sebagaimana yang sering kita dengan sehari-hari, yaitu tata usaha. Memang tata usaha merupakan unsur administrasi dalam arti luas. Secara lengkap unsur-unsur pelaksanaannya tersebut sebagai berikut.

- a. Pengorganisasiaan
- b. Manajemen
- c. Tata hubungan
- d. Keuangan
- e. Perbekalan
- f. Tata usaha
- g. perwakilan

2. konsep Organisasi

Organisasi merupakansebagai tempat atau wadah kegiatan bagi orang-orang yang bekerja di dalamnya yang bertujuan mencapai suatu tujuan secara bersamaan. Didalam suatu organisasi tersebut terdapat didalamnya tugas dan tanggung jawab wewenang yang ada di dalamnya yang mana agar kerja orang-orang didalam organisasi terlaksana dengan jelas.

Menurut Stephen P. Robbin (1990 : 4) mengatakan bahwa organisasi diartikan sebagai kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relative terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Menurut Dwight (dalam Syafie, 2006 ; 52) organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antar orang-orang pada suatu sistem administrasi.

Menurut Fathoni, 2006 ; 4) organisasi adalah proses kegiatan diatas/diatur menurut sifat, bidang, jenis urgensinya, kegiatan selaku pimpinan bantuan staf, maupun pelaksana operasional proses kegiatan tersebut merupakan system usaha kerjasama sekelompok manusia secara rasional untuk mencapai tjuan yang telah ditetapkan.

Menurut Jhon D. Millet (dalam Siagian, 2006 ; 51) organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang yang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama.

Pada hakikatnya, pengertrian organisasi diatas dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama organisasi dipandang sebagai wadah/ tempat berlangsungnya suatu organisasi dalam melaksanakan tujuannya. Kedua, organisasi dipandang sebagai “proses suatu organisasi menjalankan tujuan-tujuannya seperti interaksi-interaksi antara orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut.

Sebagai suatu proses, Organisasi serangkaian kolektif sekelompok orang yang diawali dengan penelitian tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan dan diakhiri dengan pengevaluasian pelaksanaan tugas (Zulkifli, 2005 ; 128).

Menurut Terry dalam Hamim (2005 : 24) Organisasi ialah bersalah kata “ organisasi “ yaitu struktur dengan bagian yang demikian di integrasi hingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhan hubungan mereka. Organisasi terdiri dari dua bagian pokok, yaitu bagian-bagian dan hubungan-hubungan dimana organisasi bukanlah sekedar kumpulan orang dan sekedar pembagian kerja hanyalah salah satu azas organisasi. Sedangkan pembagian kerja lebih tepat dinamakan pengorganisasiaan.

3. Konsep manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Manajemen merupakan alat atau wadah untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Secara umum manajemen bisa diartikan sebagai seni dan ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola manusia dan materil untuk mencapai tujuan. Sebagai alat pelaksana dari administrasi, manajemen diperlukan agar tujuan organisasi bisa dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Menurut Siagian (dalam Burhanuddin 2015;22) manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggara berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajemen untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan.

Menurut Sadikin (dalam Burhanuddin 2015;22) bahwa manajemen adalah proses untuk menciptakan, memelihara, dan mengoperasikan organisasi perusahaan dengan tujuan tertentu melalui upaya manusia yang sistematis, terkoordinasi, dan kooperatif.

Menurut Manulang (dalam Zulkifli 2015;4) pengertian manajemen dapat dilihat dari tiga pengertian :

- a. Manajemen sebagai proses
- b. Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia

c. Manajemen sebagai ilmu (science) dan (art)

Selanjutnya Hasibuan (2012;2) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen ini terdiri dari 6 unsur (6M) yaitu : Man, Money, Methode, Machines, Materials dan Market.

Untuk mencapai tujuan para manajer membutuhkan enam M, dengan kata lain Sarana (tools) atau manajemen untuk mencapai tujuan adalah man, money, machines, methods dan markets. Kesemuanya itu disebut sumber daya. Manullang (2009;5), untuk memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi maka diperlukanlah fungsi-fungsi manajemen, pada hakikatnya apabila dikombinasikan pendapat para ahli menurut Manullang (2009;8) fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut :

1. Forecasting
2. Planning
3. Organizing
4. Staffing
5. Directing
6. Leading
7. Coordinating
8. Motivating

9. Controlling

10. Reporting

Fungsi-fungsi manajemen tersebutlah yang akan mengolah sumber daya organisasi secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Dari beberapa definisi yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan aktivitas atau suatu proses untuk mencapai tujuan melalui kerjasama dengan orang lain, baik di dalam organisasi maupun diluar organisasi dengan membangun net working seperti pelanggan, public maupun pihak-pihak lain demi kesuksesan organisasi.

4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Hasibuan (2005;244) menjelaskan sumber daya manusia atau man power merupakan kemampuan yang dimiliki setiap manusia. Sumber Daya Manusia terdiri atas daya pikir dan daya fisik setiap manusia. Tegasnya, kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya pikir dan daya fisiknya. Sumber Daya Manusia menjadi unsur pertama dan utama dalam setiap aktivitasnya. Peralatan canggih tanpa peran aktif Sumber Daya Manusia tidak berarti apa-apa.

Hasibuan (2005;244) menjelaskan bahwa sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.

Menurut Veihzal Rivai (2009) Manajemen adalah salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian.

Menurut Fathoni (2006;10) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah proses pengendalian berdasarkan fungsi manajemen terhadap daya yang bersumber dari manusia.

Manusia sebagai penggerak organisasi harus diawasi dan diarahkan agar apa yang menjadi tanggung jawab dan tugas dapat sejalan dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Sunyoto (dalam Baharuddin 2015;28) manajemen sumber daya manusia adalah pendekatan terhadap manajemen manusia. Pendekatan terhadap manusia didasarkan pada nilai manusia dalam hubungannya dengan organisasi. Manusia merupakan sumber daya yang penting dalam organisasi, disamping itu efektifitas organisasi ditentukan oleh manajemen manusia.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia adalah seuma yang melakukan aktifitas dengan kemampuan daya piler dan daya fisik yang dimiliki oleh setiap individu.

5. Konsep Koordinasi

Setiap kegiatan dan aktifitas yang dilakukan organisasi melalui bawahan harus disatukan, diintegrasikan dan diarahkan untuk mencapai tujuan, dengan kata lain tanpa koordinasi tugas dan pekerjaan dari setiap individu dan karyawan tidak akan tercapai. Menurut Handoko (2003;195) koordinasi adalah proses terpisah (departemen-departemen atau (bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Menurut Terry (dalam Hasibuan, 2006;85) koordinasi adalah usaha yang sinkron teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Djamin (dalam Hasibuan, 2006;86) koordinasi adalah suatu kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi.

Menurut Brech (dalam Hasibuan, 2006;12) koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri.

Menurut Manullang (2009;72) adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin

untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Dengan adanya koordinasi akan terdapat keselarasan aktifitas diantara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Serta dengan koordinasi diharapkan akan tercipta suasana kerjasama kesatuan tindakan dan kesatuan tujuan akhir. Koordinasi itu sangat penting karena:

1. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, perkecokan dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan
2. Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan perusahaan
3. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan
4. Supaya semua unsur manajemen (6M) dan pekerjaan masing-masing individu karyawan harus membantu tercapainya tujuan organisasi
5. Supaya tugas, kegiatan dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan. Hasibuan (2008:86).

6. Konsep Fungsi

Soekanto istilah “fungsi” telah banyak digunakan oleh berbagai disiplin ilmu dan juga sangat populer dalam percakapan masyarakat sehari-hari. Tidak jarang pengertian yang diberikan disiplin ilmu lain dan percakapan sehari-hari, menjadi pengertian yang diterima sosiologi atau bahkan menjadi kabar berita. (dalam Rahyunir Rauf dan Maulidah 2016;139)

Menurut Robert, (1967;75) fungsi dikaitkan dengan aktivitas yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menduduki posisi politis tertentu.

Konsep fungsi menurut reading didefinisikan sebagai aktivitas untuk mendapatkan sesuatu (dalam zulkifli dan yogia,2014,34)

Menurut Moenir (2010 : 24) fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

7. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat itu sendiri.

Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. (Kartasmita,1996).

Menurut definisinya, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat (Mas'ood,1990). Keberdayaan masyarakat oleh Sumodiningrat (1997) diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.

Pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya, yang berupa: modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran, dll. Agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi perbaikan kehidupan dan kesejahteraannya (Sumodiningrat, 2003)

Menurut Dhal (1963) pemberdayaan berasal dari kata empowerment. Sangat berkaitan dengan kekuatan atau kekuasaan (power). Karena itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan kekuatan-kekuatan atau kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pihak lain, yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh pihak yang

lainnya lagi. Di samping itu, pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai pembagian kekuasaan yang adil (Paul, 1987), agar “yang lemah” memiliki kesadaran berpolitik serta dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

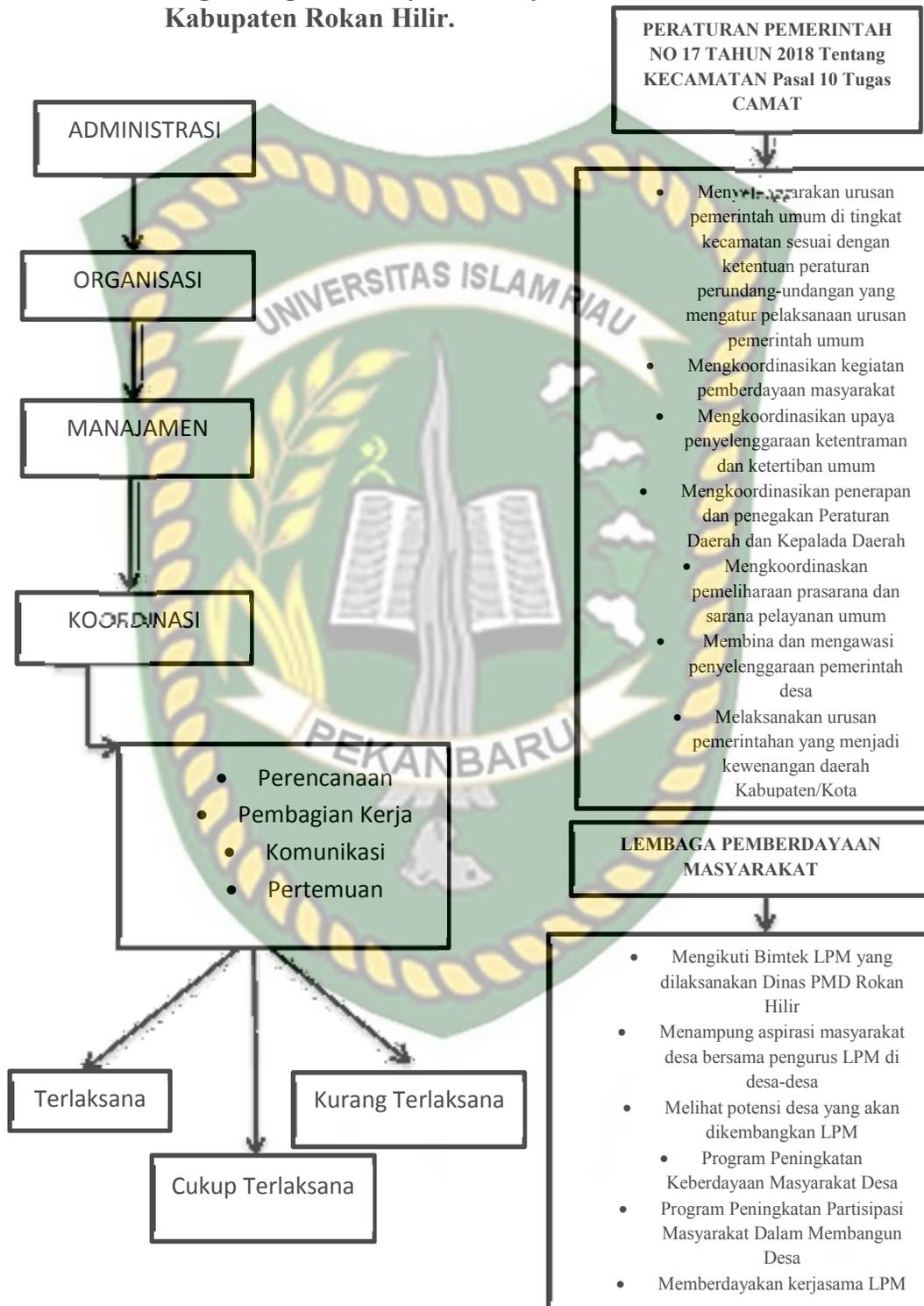
Subejo dan Narimo (2004) mengartikan proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial.

Menurut Anthony Bebbington (2000) Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, Pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

B. Kerangka Pikir

Dari latar belakang yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya serta didukung oleh fenomena sehingga dapat diadakannya penelitian kemudian melihat dasar-dasar teoritis yang dapat digunakan, maka dibuatlah kerangka piker sebagai alur berpikir penulis dan rangkaian proses penelitian yang akan dilakukan, maka kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar II.1: Kerangka Pikir Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Camat Dalam Kegiatan pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.



C. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan fenomena serta konsep teoritis yang telah dikemukakan maka dapatlah dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut: Diduga bahwa Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Belum Terlaksana dengan baik.

d. Konsep Operasional

Untuk memperjelas konsep teoritis dan pengertian yang akan dioperasionalkan dalam penelitian ini, maka penulis akan mengoperasionalkan konsep tersebut untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan ini. Beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini baik variabel maupun indikator yakni sebagai berikut :

1. Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Organisasi merupakan suatu kerjasama kelompok orang yang membagi tugas-tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyatukan aktivitas-aktivitas kearah percapaian tujuan bersama.

3. Manajemen adalah proses untuk menciptakan, memelihara, dan mengoperasikan organisasi perusahaan dengan tujuan tertentu melalui upaya manusia yang sistematis, terkoordinasi, dan kooperatif.
4. Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.
5. Tugas pokok dan fungsi merupakan kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.
6. Memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat ialah memberikan sesuatu informasi yang dapat menambah pengetahuannya dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh suatu organisasi.
7. Mengusahakan agar pengetahuan dan penerima tujuan yang akan dicapai oleh anggota adalah kegiatan yang dilakukan untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan suatu kegiatan.
8. Mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide dan saran-saran ialah memberikan kesempatan kepada anggota organisasi untuk dapat memberikan masukan seperti saran atau ide untuk membangun kegiatan agar lebih baik lagi.

9. Mendorong para anggota untuk berpartisipasi dalam tingkatan perumusan dan penciptaan sasaran merupakan peran serta seseorang atau kelompok dalam proses kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian.
10. Sering melakukan komunikasi informasi yaitu penyampaian dan pertukaran informasi sekurang-kurangnya dua pihak dengan menggunakan berbagai media.

e. Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan konsep yang penulis tetapkan sebagai batasan penelitian dan juga penelitian variabel dalam penelitian ini yang berdasarkan teori yang telah penulis paparkan pada studi kepustakaan, operasionalitas variabel dalam penelitian ini di sajikan dalam bentuk table, yang mana berisi mengenai uraian konsep variabel indicator, ukuran dan skala dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Maka operasionalisasi variabel dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel II.1: Operasional Variabel Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penelitian	Skala
Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan menggerakkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Terry (dalam Hasibuan 2006: 85)	Koordinasi	1. Perencanaan	a. Merencanakan program pemberdayaan masyarakat b. Menentukan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	Ordinal
		2. Pembagian Kerja	a. Pembagian tugas pada kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pelayanan umum b. Adanya spesialisasi tugas	Ordinal
		3. Komunikasi	a. Lisan b. Tulisan	Ordinal
		4. Pertemuan	a. Rapat mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat b. Adanya diskusi antara instansi terkait mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat	Ordinal

F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indicator dalam penelitian ini diklasifikasikan tiga (3) kategori yaitu:

1. Terlaksana : nilai skor = 3
2. Cukup Terlaksana : nilai skor = 2
3. Kurang Terlaksana : nilai skor = 1

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala ordinal, menurut Sugiyono (2010;98) adalah skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan peringkat *construct* yang diukur.

Ukuran variabel

Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Pelaksanaan Fungsi Camat Dalam Mengkordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir 67-100%

Cukup Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Pelaksanaan Fungsi Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir 34-66%

Kurang Terlaksana : Apabila penilaian terhadap indikator Pelaksanaan Fungsi Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir 1-33%

Ukuran Indikator Variabel

1. Perencanaan

Terlaksana : Apabila persentase hasil penelitian terhadap seluruh sub indikator Perencanaan yang telah ditetapkan berada pada skala 67-100%

Cukup Terlaksana : Apabila persentase hasil penelitian terhadap seluruh sub indikator Perencanaan yang telah ditetapkan berada pada skala 34-66%

Kurang Terlaksana : Apabila persentase hasil penelitian terhadap seluruh sub indikator Perencanaan yang telah ditetapkan berada pada skala 1-33%

2. Pembagian Kerja

Terlaksana : Apabila persentase hasil penelitian terhadap seluruh sub indikator Pembagian Kerja yang telah ditetapkan berada pada skala 67-100%

Cukup Terlaksana : Apabila persentase hasil penelitian terhadap seluruh sub indikator Pembagian Kerja yang telah ditetapkan berada pada skala 34-66%

Kurang Terlaksana : Apabila persentase hasil penelitian terhadap seluruh sub indikator Pembagian Kerja yang telah ditetapkan berada pada skala 1-33%

3. **Komunikasi**

Terlaksana : Apabila persentase hasil penelitian terhadap seluruh sub indikator Komunikasi yang telah ditetapkan berada pada skala 67-100%

Cukup Terlaksana : Apabila persentase hasil penelitian terhadap seluruh sub indikator Komunikasi yang telah ditetapkan berada pada skala 34-66%

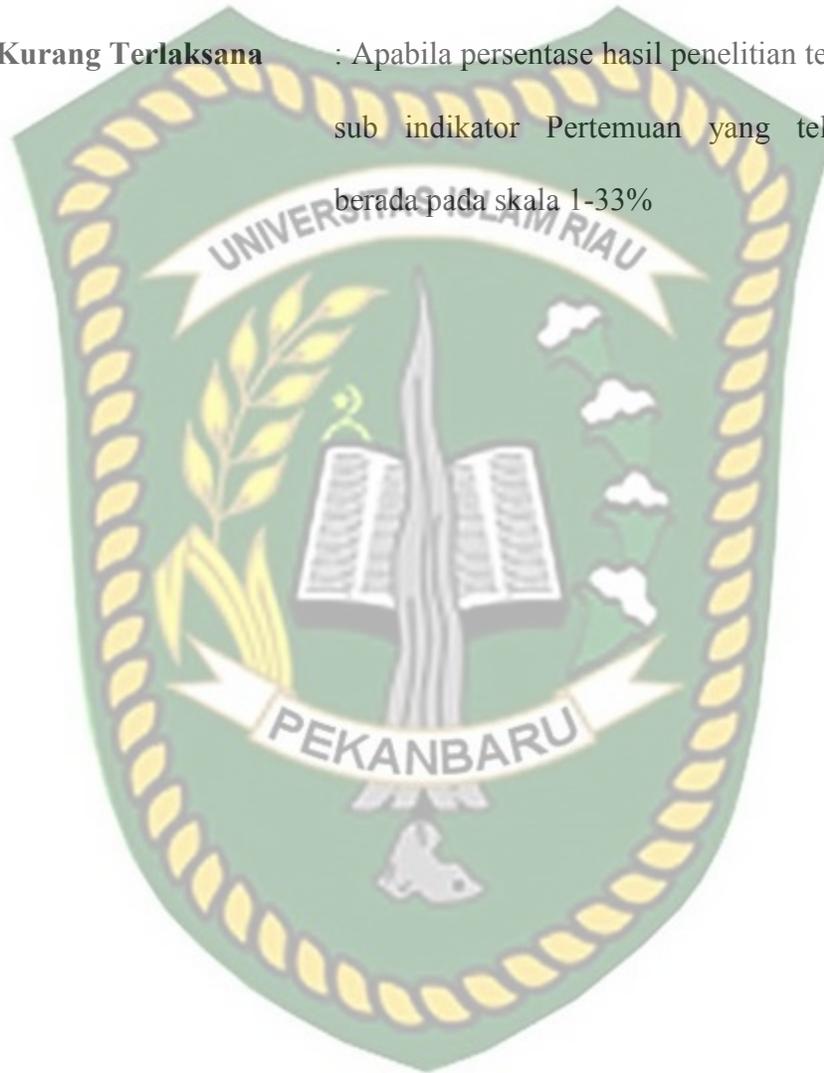
Kurang Terlaksana : Apabila persentase hasil penelitian terhadap seluruh sub indikator Komunikasi yang telah ditetapkan berada pada skala 1-33%

4. **Pertemuan**

Terlaksana : Apabila persentase hasil penelitian terhadap seluruh sub indikator Pertemuan yang telah ditetapkan berada pada skala 67-100%

Cukup Terlaksana : Apabila persentase hasil penelitian terhadap seluruh sub indikator Pertemuan yang telah ditetapkan berada pada skala 34-66%

Kurang Terlaksana : Apabila persentase hasil penelitian terhadap seluruh sub indikator Pertemuan yang telah ditetapkan berada pada skala 1-33%



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe Deskriptif, dengan analisa Kuantitatif yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya mengenai objek penelitian yang penulis teliti dengan memprioritaskan alat bantu penelitian yaitu kuisioner yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variable satu dengan lainnya (dalam Sugiyono, 2003;1).

Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yaitu definisi, pengukuran data kuantitatif dan statistic objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang pada penduduk yang diminta menjawab atau sejumlah pertanyaan tentang survey untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kecamatan Bakai jaya Kabupaten Rokan Hilir, dimana dalam menjalankan tugasnya sebagai camat yaitu dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Terlihat masih banyak permasalahan yang

terjadi sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak merata dan masih belum maksimal.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2012;80) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Seluruh pegawai pada Kantor Camat Balai Jaya dan Masyarakat di Kecamatan Bagan Sinembah.

2. Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2012;81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi juga harus representative (mewakili).

Maka sampel pada penelitian ini merupakan sebagian dari pegawai kantor Camat Balai Jaya dan sebagian dari masyarakat Balai Jaya, untuk lebih jelasnya mengenai sampel penelitian dapat dilihat dari table dibawah ini.

Tabel III.1 : Tabel Populasi dan Sampel Penelitian.

No	Keterangan	Populasi	Sampel	Persentase
1	Camat	1	1	100%
2	Sekretaris Camat	1	1	100%
3	Kasi Kesejahteraan Pemberdayaan Masyarakat	1	1	100%
4	Kepala Desa Se Kecamatan	11	8	72%
5	Ketua LPM Se Kecamatan	16	7	43%
6	Masyarakat	20	20	100%
Jumlah		50	38	76%

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sensus khususnya pada Camat 1 orang, sekretaris Camat 1 orang dan Kasi pemberdayaan masyarakat berjumlah 1 orang, kemudian untuk kepala desa LPM dan Masyarakat, dengan cara purposive sampling yang mana jenis sampling ini merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan alasan tertentu yang sama peneliti sendiri yang menentukan sampel dengan alasan sampel tersebut dapat mewakili populasi yang ada, sehingga kepala desa sebanyak 8 sampel dari 11 desa. Kemudian LPM sebanyak 7 dari 16 ketua LPM dan 20 orang masyarakat. Dengan alasan pertimbangan jarak lokasi.

E. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang baik serta keterangan-keterangan dan data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dengan hasil pengamatan penelitian yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi atau diperoleh melalui kegiatan peneliti turun langsung kelapangan/lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap serta berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu langsung mewawancarai informan yang menjadi objek penelitian Sehingga diperoleh data, informasi serta keterangan mengenai penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data dan informasi serta keterangan yang relevan dari organisasi yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Data sekunder ini diperoleh dari Kantor Camat Balai Jaya, baik dari dokumen resmi yang diberikan seperti arsip literature berupa struktur organisasi, maupun informasi atau keterangan yang telah dipublikasikan/ditempelkan di papan/dinding informasi di Kantor Camat Balai Jaya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian.

2. Kuisisioner / Angket

Kuisisioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh sejumlah responden (Narimawati, 2007:64). Pengumpulan data untuk penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan angket atau kuisisioner.

3. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab oleh peneliti kepada responden. Teknik ini dilakukan agar informasi yang didapatkan oleh peneliti lebih absah, jelas dan akurat serta aktual. Dan kemudian teknik ini juga sangat bermanfaat jika diterapkan pada informan atau responden yang dianggap banyak tahu tentang apa yang sedang diteliti oleh peneliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas untuk mengabadikan sebuah momen baik foto, video maupun rekaman atau media lain.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan dianalisis secara deskriptif, yaitu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta dilapangan dan hasilnya akan disajikan dan dilengkapi dengan uraian-uraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat ditarik kesimpulan.

Usaha mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap dalam aspek yang diamati dan diselidiki agar jelas keadaan kondisi sebenarnya. Penemuan fenomena dan gejala-gejala itu tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk juga usaha menemukan hubungan satu dengan lainnya didalam aspek yang diteliti.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999. Wilayah Kabupaten Rokan Hilir terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera antara 101o4' -2030' LU dan 100o16' BT. Luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah 8.881,59 km², dengan jumlah kecamatan pada tahun 2015 adalah 18 kecamatan, dimana kecamatan tanah putih merupakan kecamatan terluas yaitu 1.915,23 km² dan kecamatan yang terkecil adalah kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dengan luas wilayah 198,39 km². Kabupaten Rokan Hilir memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malak
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu
- c. Sebelah Timur : Kota Dumai
- d. Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Utara

Sebagian besar wilayah kabupaten Rokan Hilir terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa terutama di sepanjang sungai rokan hingga ke muaranya. Wilayah ini memiliki tanah yang sangat subur dan menjadi lahan persawahan padi terkemuka di Provinsi Riau. Wilayah Kabupaten Rokan Hilir juga terdiri dari daratan yang menyatu dengan pulau Sumatera dan beberapa pulau-pulau di sekitarnya.

Kabupaten Rokan Hilir dipengaruhi oleh keberadaan 16 aliran sungai. Sungai Rokan merupakan sungai utama dengan panjang 350 km dan Tanah Putih. Sungai Rokan berasal dari dua cabang anak sungai yaitu sungai Rokan Kanan dan sungai Rokan Kiri yang hulu anak sungainya di pegunungan bukit barisan pada bagian timur Kabupaten Tapanuli Selatan dan pada bagian Barat Kabupaten Rokan hulu.

Secara Administrasi Kabupaten Rokan Hilir telah mengalami beberapa kali pemekaran wilayah sejak terbentuknya pada tahun 1999 yang merupakan pemekaran dari kabupaten induknya Bengkalis sesuai dengan undang-undang No. 53. Pada awal berdirinya kabupaten Rokan Hilir terdiri dari 6 Kecamatan yaitu kecamatan Bangko, kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Bagan Sinembah, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Rimba Melintang dan kecamatan Kubu. Sering dengan bertambahnya waktu dan pertumbuhan penduduk maka dilakukan beberapa kali pemekaran. Setelah lebih kurang 14 (empat belas) tahun Kabupaten Rokan Hilir berdiri, pemerintah kabupaten Rokan Hilir telah menjadi 15 Kecamatan.

Kecamatan Balai Jaya memiliki 11 kepenghuluan atau kelurahan yang terdiri dari 9 kepenghuluan dan 2 kelurahan dengan jumlah penduduk 48.293 jiwa dengan 14.257 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 24.456 jiwa penduduk laki-laki dan 23.837 jiwa penduduk perempuan yang berdomisili:

1. Kelurahan Balai Jaya Kota	:7.635 jiwa (1.877 kk)
2. Kelurahan Balam Sempurna Kota	:4.359 jiwa (1.021 kk)
3. Kepenghuluan Balai Jaya	:5.246 jiwa (2.406 kk)
4. Kepenghuluan Balam Sempurna	:10.406 jiwa (3.967 kk)
5. Kepenghuluan Pasir Putih	:4.886 jiwa (1.261 kk)
6. Kepenghuluan Kencana	:2.035 jiwa (448 kk)
7. Kepenghuluan Lubuk Jawi	:2.131 jiwa (576 kk)
8. Kepenghuluan Bagan Bhakti	:1.638 jiwa (442 kk)
9. Kepenghuluan Pasir Putih Utara	:2.399 jiwa (498 kk)
10. Kepenghuluan Pasir Putih Barat	:1.947 jiwa (511 kk)
11. Kepenghuluan Balam Jaya	:5.611 jiwa (1.250 kk)

B. Struktur Organisasi Kecamatan Balai Jaya

Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi kecamatan berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 29 tahun 2009 tentang Kabupaten Rokan Hilir. Susunan organisasi kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir antara lain:

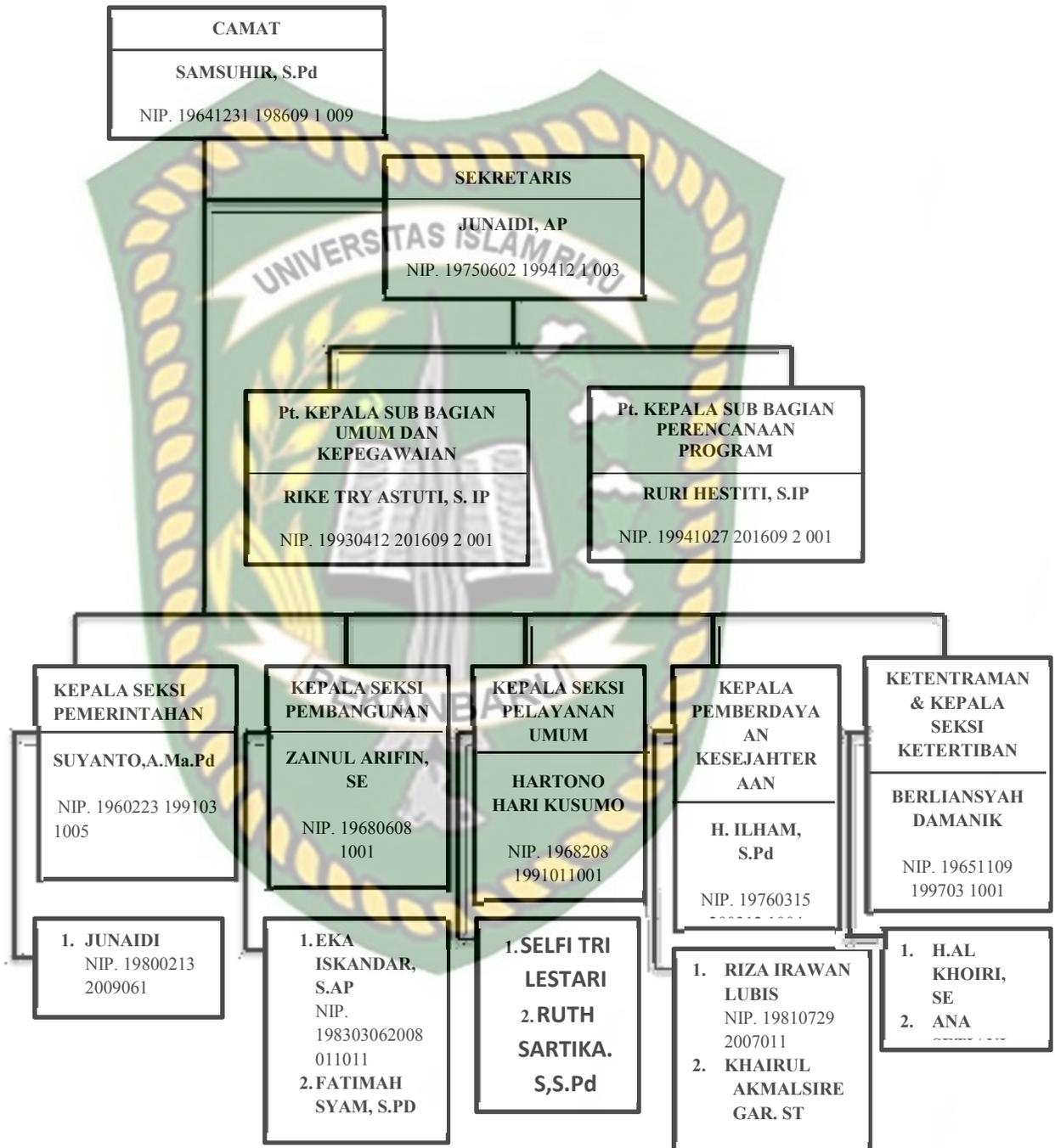
- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan
- c. Kasi Pemerintahan
- d. Lurah Balam Sempurna Kota
- e. Kasi Pelayanan Umum
- f. Seklur Balam Sempurna Kota

- g. Kasi Pembangunan
- h. Seklur Balai Jaya Kota
- i. Kasi Ketentraman dan Keyertiban
- j. Kasi Pemberdayaan Kejahteraan Masyarakat
- k. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- l. Plt Kasubbag Keuangan
- m. Staf Kantor Camat



Berikut ini gambar dari struktur Kecamatan Balai Jaya :

Gambar VI.1: Struktur Kecamatan Balai Jaya



Berikut ini tugas dan fungsi struktur organisasi kantor kecamatan balai jaya berdasarkan peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 66 Tahun 2016 yaitu:

1. Camat

Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan juga kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati sesuai karakteristik, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas Camat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagai kewenangan pemerintah dari Kabupaten
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan pelayanan umum
- e. Pengkoordinasian pemelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- f. Pengkoordinasian penyelenggara kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan
- g. Pembinaan penyelenggara pemerintah desa dan kelurahan
- h. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah kecamatan, desa atau kelurahan
- i. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan

2. Sekretaris Kecamatan

- a. Sekretaris kecamatan di pimpin oleh seorang sekretarias yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat
- b. Sekretaris kecamatan mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan.

Sekretaris kecamatan mempunyai fungsi menyelenggarakan urusan tat usaha, kearsipan, keuangan, kepegawaian, aset, perlengkapan dan perencanaan.

3. Sub Bagian Kecamatan dan Aset

Sub bagian Kecamatan dan Aset dipimpin oleh seorang kepala sub yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris kecamatan. Sub bagian keuangan dan aset mempunyai tugas pokok dalam penyusunan pengelolaan administrasi keuangan dan aset. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, sub bagian keuangan dan aset mempunyai fungsi;

- a. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan penyiapan rencana anggaran pendapatan dan belanja kecamatan
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan, penyusun rencana kegiatan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)

- c. Pengelolaan pembinaan dan pembukuan keuangan anggaran belanja rutin dan pembangunan
 - d. Pelaksanaan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan dan aset; pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan keuangan belanja rutin dan pembayaran keperluan dinas
 - e. Pelaksanaan oengkoordinasian pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan daerah
 - f. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan bukti-bukti kas dan surat-surat berharga lainnya;
 - g. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan perbendaharaan
 - h. Penyusunan laporan hasil kegiatan di bidang administrasi keuangan dan aset
 - i. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan aset
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris kecamatan. Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan surat menyurat kearsipan, pengadaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan dinas dan infestarisasi dan prasarana dinas, pengelolaan perpustakaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian. Dalam menyelenggarakan

tugas pokok sebagai mana dimaksud, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan dibidang urusan umum dan kepegawaian
- b. Pelaksanaan urusan kesekretariatan
- c. Penyimpanan, pengaturan dan pemeliharaan arsip dinas
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalan dinas
- e. Penyusunan perencanaan keperluan alat-alat tulis di kantor dan penyusunan petunjuk pelaksanaannya
- f. Pemeliharaan gedung, ruangan, peralatan, pekarangan, ketertiban dan kebersihan serta keamanan kantor kecamatan
- g. Pengurusan eksploitasi dan pemeliharaan kendaraan dinas
- h. Pengadaan perlengkapan dan perbekalan
- i. Penyimpanan, penerimaan dan pendistribusian perlengkapan dan perbekalan
- j. Penyiapan kelengkapan untuk keperluan rapat-rapat dinas
- k. Pengurusan adminitrasi peralatan, perlengkapan dan perbekalan serta pengurusan administrasi inventarisasi kekayaan milik Negara
- l. Pelaksanaan punlikasi dan dokumentasi pelaksanaan tugas dinas
- m. Pelaksanaan umum keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas
- n. Pengelolaan sistem informasi manajemen perlengkapan
- o. Pengelolaan perpustakaan dinas dan hubungan masyarakat

p. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan dan kepegawaian

5. Seksi Pelayanan Umum

a. Seksi pelayanan umum di pimpin oleh seorang kepala seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat

b. Seksi pelayan umum mempunyai fungsi membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelayanan umum

6. Seksi Pembangunan

a. Seksi pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat

b. Seksi perekonomian dan pembangunan mempunyai fungsi membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan perekonomian dan pembangunan.

seksi perekonomian dan pemaangunn mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pembangunan di bidang perekonomian desa/keluarahan, koperasi, produksi dan distribusi serta lingkungan hidup.

7. Seksi Pemerintahan

a. Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat

- b. Seksi pemerintahan mempunyai fungsi membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan

Seksi pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggara pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pembinaan kesatuan bangsa dan organisasi kemasyarakatan serta pertahanan.

8. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat

- a. Seksi pemberdayaan kesejahteraan masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat
- b. Seksi pemberdayaan kesejahteraan masyarakat mempunyai fungsi membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat sosial dan budaya

Seksi pemberdayaan kesejahteraan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelayanan sosial dan bantuan sosial pembinaan kepemudaan dan olahraga, peranan wanita, pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, tenaga kerja dan kesehatan masyarakat.

9. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Seksi ketentraman dan ketertiban umum dipimpin oleh seorang kepala seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat
- b. Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

C. Gambaran Umum Kecamatan Balai Jaya

Kecamatan Balai Jaya merupakan salah satu Kecamatan yang baru dimekarkan berdasarkan peraturan Daerah Rokan hilir Nomor 9 Tahun 2014. Kecamatan Balai Jaya terdapat di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dimana secara geografis Kecamatan Balai Jaya berada pada jalur Lintas timur Sumatera yang memiliki peran penting sebagai lalu lintas dan sumber ekonomi sekaligus pendapatan bagi masyarakat. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Balai Jaya adalah sebagai berikut :

1. Sebalah Utara berbatas dengan kecamatan Kubu dan Kecamatan Bagan Sinembah Raya
2. Sebalah Selatan berbatas dengan Kecamatan Pujud

3. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Bagan Sinembah dan Kecamatan Bagan Sinembah Raya
4. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Bangko Pusako

Kecamatan Balai Jaya memiliki 11 (sebelas) kepenghuluan / kelurahan yang terdiri dari 9 (sembilan) kepenghuluan dan 2(dua) kelurahan dengan jumlah penduduk 48.293 Jiwa dengan 14.257 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari 24.456 Jiwa penduduk Laki-Laki dan 23.837 Jiwa penduduk perempuan.

Visi Kantor Kecamatan Balai Jaya

1. Terwujudnya tingkat pendapatan bagi masyarakat Kecamatan Balai Jaya
2. Tingginya tingkat pendidikan
3. Terwujudnya infrastruktur yang memadai
4. Terwujudnya tingkat kesehatan masyarakat
5. Tingginya angka harapan hidup dan kualitas pelayanan sosial yang baik
6. Terwujudnya tingkat kemakmuran masyarakat di Kecamatan Balai Jaya

Misi Kantor Kecamatan Balai Jaya

Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintah yang handal, bersih dan beribawa
2. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya melayu yang berlandaskan iman dan taqwa

3. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat
5. Mewujudkan infrastruktur dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat baik sektor perkebunan, pertanian, peternakan dan lain-lain



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 38 orang Responden terdiri dari 1 Camat Balai Jaya, 1 orang Sekretaris Balai Jaya, 1 orang Kasi Kesejahteraan Pemberdayaan Masyarakat, 8 orang Kepala Desa Se Kecamatan, 7 Orang Ketua LPM Se Kecamatan Balai Jaya dan 20 orang Masyarakat. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat pada keterangan dibawah ini sebagai berikut

1. Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Untuk menilai Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, dapat dilihat oada tebel di bawah ini :

Table v.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-Laki	27	71%
2	Perempuan	11	29%
Jumlah		38	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 5.1 di atas dapat diketahui dan terlihat bahwa secara keseluruhan responden dalam penelitian ini sebanyak 38 orang, dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 27 orang atau sama dengan 71% dan perempuan sebanyak

11 orang atau sama dengan 29% mayoritas responden atau hampir keseluruhan adalah berjenis laki-laki.

2. Kelompok Umur

Kelompok umur disini ialah penulis akan mengelompokkan umur responden dengan cara tingkatan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran dari umur responden penelitian. Kemudian akan dijelaskan pembagian identitas responden berdasarkan kelompok umur, maka table mengenai informasi pengelompokan umur dapat dilihat pada table V.2 dibawah ini:

Tabel V.2 Identitas Responden Berdasarkan Kelompok Umur

NO	Umur	Jumlah	persentase
1.	17-30	13	34%
	31-40	15	39%
	41-50	7	18%
	51 Tahun Ke Atas	3	9%
	Jumlah	38	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2022

Dari table V.2 di atas dapat di jelaskan bahwa responden yang paling dominan adalah berumur 31-40 tahun yakni 15 orang atau 39% dan di ikuti oleh umur di antara 17-30 tahun yakni sebanyak 13 orang atau 34%, selanjutnya di umur 41-50 tahun sebanyak 7 orang atau 18%, kemudian paling sedikit umur di atas 51 tahun yakni sebanyak 3 orang atau sama dengan 9%. Jadi dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini responden yang diminta pendapatnya berada pada kategori umur yang produktif dalam pengumpulan data responden.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan disini menggambarkan identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang di tempuh kemudian dalam identitas responden yang berada pada kuisisioner ini adalah mengenai informasi pengelompokan pendidikan yang dapat dilihat pada table V.3 di bawah ini:

Tabel V.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	0	0%
2.	SMP	4	10%
3.	SMA	20	52%
4.	Diploma	2	5%
5.	Strata satu (S1)	12	33%
6.	Strata dua (S2)	0	0%
	Jumlah	38	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian Tahun 2022

Dari table V.3 di atas dapat dilihat bagaimana tingkat pendidikan dari responden, dimana terlihat pendidikan tertinggi dari responden adalah SMA yang berjumlah 20 orang dengan 52%, selanjutnya tamatan Strata Satu (S1) berjumlah 12 orang dengan 33%, dan disusul tamatan SMP yang berjumlah 4 orang dengan 10%, kemudian yang terakhir adalah Diploma yang berjumlah 2 orang atau sama dengan 5%. Jadi dari data tersebut dapat dilihat latar pendidikan responden dalam penelitian ini yang lebih banyak adalah tamatan SMA dan sudah mendekati kategori cukup, sehingga jawaban yang diberikan juga lebih baik .

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Pada bagian ini akan di bahas dan dijelaskan mengenai analisis terhadap tanggapan-tanggapan responden terhadap indicator-indikator penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

Pemberdayaan merupakan salah satu fungsi pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan menjadi lebih baik, pemberdayaan bukan hanya kebijakan pemerintah pusat melainkan juga merupakan tugas yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakannya, khususnya pada wilayah kecamatan yang di pimpin langsung oleh seorang Camat.

Camat merupakan salah seorang pemimpin wilayah kecamatan dan sebagai wilayah kecamatan dan sebagai seorang coordinator wilayah yang ditugaskan dalam mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan yang juga diharapkan bisa memberi pengarahan, mengajak masyarakat, dan ikut serta dalam kegiatan pemberdayaan, serta sebagai pimpinan dalam menjaga hubungan baik dan komunikasi yang baik antar sesama perangkat Kecamatan, perangkat Kelurahan dan semua masyarakat yang berada di wilayah pimpinannya.

Tetapi permasalahan yang sedang di bahas di penelitian ini adalah dapat di lihat dari fenomena yang ada yaitu tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat

khususnya di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir masih terjadi seperti kurangnya informasi yang di berikan pemerintah Kecamatan, dan kurangnya komunikasi yang baik, kurang sinkronnya antara pemerintah Kecamatan dengan masyarakat sangat kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pada dasarnya pelaksanaan fungsi koordinasi Camat di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dapat di ketahui beberapa indikator yang mana penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan beberapa sub indikatornya yaitu : Perencanaan, Pengorganisasian, Pengawasan, Komunikasi. Dan teknik pengumpulan data ialah menggunakan kuisioner secara langsung kepada responden yang akan di sajikan.

1. Perencanaan

Pelaksanaan Fungsi Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dapat di ukur salah satunya dengan indikator Perencanaan. Perencanaan sebagai keputusan yang akan dikerjakan untuk waktu yang akan datang. Yaitu suatu perencanaan yang di proyeksikan dalam suatu tindakan.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau responden dari Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Desa Se Kecamatan, dan Ketua Lpm Se Kecamatan pada Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Camat Dalam Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat yang berjumlah 38 responden terhadap indikator perencanaan yang terdiri dari Empat item penelitian yaitu perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sudah sesuai dengan kebutuhan, perencanaan kegiatan masyarakat sudah baik, sarana dan prasarana dalam perencanaan, sarana dan prasarana dapat digunakan oleh semua masyarakat.

Perencanaan adalah menyusun langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.

Perencanaan mengandung rangkaian-rangkaian putusan yang luas dan penjelasan-penjelasan dari tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program, penentuan metode, dan prosedur tertentu dan penentuan kegiatan berdasarkan jadwal sehari-hari.

Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, untuk itu diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola tindakan untuk masa mendatang.

Tabel V.4 Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Perencanaan Terhadap Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir

No	Perencanaan	Tolak Ukur			Total
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Merencanakan Program Pemberdayaan Masyarakat	20	15	3	38
2.	Menentukan Sarana dan Prasarana yang di butuhkan	15	22	1	38
	Jumlah	35	37	4	76
	Rata-Rata	17,5	18,5	2	38
		46%	49%	5%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2022

Berdasarkan table V.4 diatas dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang menjelaskan tentang perencanaan pada Pemberdayaan Masyarakat yang menjelaskan pada pertanyaan pertama kategori terlaksana berjumlah 20 orang dengan persentase 53%, jawaban responden dengan kategori cukup terlaksana berjumlah 15 orang dengan persentase 39% , sedangkan pada kategori kurang terlaksana berjumlah 3 orang dengan persentase 8% .

Selanjutnya tanggapan responden terhadap pertanyaan kedua kategori terlaksana berjumlah 15 orang dengan persentase 39%, jawaban responden dengan

kategori cukup terlaksana berjumlah 22 orang dengan persentase 58%, sedangkan pada kategori kurang terlaksana berjumlah 4 orang dengan persentase 3%.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Camat Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Bapak Samsuhir pada saat wawancara dirumahnya :

“ jadi perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu kita lakukan setiap tahun. Pada saat pembuatan perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dan sesuai dengan laporan setiap kepala desa “ (Wawancara, Jam, Hari/Tanggal : 14.00 WIB, Senin, 20 Juni 2022)

Sedangkan berdasarkan hasil observasi di lapangan, penulis melihat dalam pemberdayaan masyarakat di bidang sosial masih ada beberapa masyarakat yang kurang mampu yang tidak menerima bantuan dari kegiatan tersebut, sehingga kegiatan tersebut belum sesuai dengan apa yang di harapkan. Seharusnya di setiap ada rapat tentang perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, sebaiknya dari pihak kecamatan mengajak masyarakat untuk ikut agar masyarakat mengetahui adanya kegiatan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara dan observasi tersebut dan berdasarkan table V.4 tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Perencanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Balai Jaya

Kabupaten Rokan Hilir dinilai **Cukup Terlaksana** dengan persentase 49% dari jumlah responden yang berjumlah 38.

2. Pembagian Kerja

Pelaksanaan Fungsi Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dapat di ukur salah satunya dengan indikator Pembagian Kerja.

Pembagian Kerja adalah informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi menurut Hasibuan (2007: 33)

Tabel V.5 Frekuensi Tanggapan Responden Tentang Pembagian Kerja Terhadap Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir

No	Penmbagian Kerja	Tolak Ukur			Total
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Pembagian Kerja Dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pelayanan Umum	12	23	3	38
2.	Pembagian Kerja Terkait Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	16	19	3	38
Jumlah		28	42	6	76
Rata – Rata		14	21	3	38

	37%	55%	8%	100%
--	-----	-----	----	------

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2022

Berdasarkan table V.5 di atas dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang menjelaskan tentang Pembagian kerja pada Pemberdayaan Masyarakat yang menjelaskan pada pertanyaan pertama kategori baik berjumlah 12 orang dengan persentase 32%, jawaban responden dengan kategori **Cukup Terlaksana** berjumlah 23 orang dengan persentase 60% , sedangkan pada kategori kurang baik berjumlah 3 orang dengan persentase 8%.

Selanjutnya tanggapan responden terhadap pertanyaan kedua kategori Terlaksana berjumlah 16 orang dengan persentase 42%, jawaban responden dengan kategori cukup terlaksana berjumlah 19 orang dengan persentase 50%, sedangkan pada kategori kurang terlaksana berjumlah 3 orang dengan persentase 8%.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Camat Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Bapak Samsuhir pada saat wawancara di rumahnya :

“ kita apabila melaksanakan satu kegiatan, tentunya kita mengadakan rapat koordinasi bersama tokoh-tokoh masyarakat terutama datuk penghulu, lurah,dan Lpm. Kita selalu membagi pembagian kerja yang kita lakukan dengan mengikut sertakan Kasi yang ada. Pada kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pelayan umum sudah diberikan tugas masing-masing. Setiap ada permasalahan yang mereka hadapi dalam memberikan pelayanan mereka selalu berkomunikasi dengan baik. Dan memberikan pelayanan umum

di kantor camat dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat kami tidak pernah memungut biaya sepeserpun.” (Wawancara, Jam, Hari/Tanggal : 14.00 WIB, Senin, 20 Juni 2022)

Sedangkan hasil observasi peneliti melihat masih banyak kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Kecamatan Balai jaya yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ataupun yang mendapatkan bantuan tidak sesuai dengan orang yang lebih membutuhkan. Adapun peneliti melihat masih banyak sekali masyarakat yang tidak memiliki KTP. Terbukti dengan pengelolaan produk layanan penerbitan KTP oleh Kecamatan Balai Jaya tahun 2020 belum optimal, hal ini dapat dilihat dari 23.035 wajib KTP, hanya 6.526 atau 28,20% penduduk yang hanya memiliki KTP.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dari hasil wawancara, dan Observasi tersebut dan berdasarkan table V.5 tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Pengorganisasian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dinilai **Cukup Terlaksana** dengan persentase 55% dengan jumlah responden 38 orang.

3. Komunikasi

Pelaksanaan Fungsi Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dapat di ukur salah satunya dengan indikator komunikasi.

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari suatu pihak ke pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan yang mudah dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.

Tabel V.6 Tabel Skor Responden Tentang Komunikasi Terhadap Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir

No	Komunikasi	Tolak Ukur			Total
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Lisan	20	15	3	38
2.	Tulisan	19	18	1	38
Jumlah		39	33	4	76
Rata – Rata		19,5	16,5	2	38
		51%	43%	6%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2022

Berdasarkan table V.6 diatas dapat diketahui bahwa jumlah jawaban responden tentang Komunikasi pada pemberdayaan masyarakat yang menjelaskan pada pertanyaan pertama kategori terlaksana berjumlah 20 orang dengan persentase 53%, jawaban responden dengan kategori cukup terlaksana berjumlah 15 orang dengan persentase 39%, sedangkan pada kategori kurang terlaksana berjumlah 3 orang dengan persentase 8%.

Selanjutnya tanggapan responden terhadap pertanyaan kedua kategori baik berjumlah 19 orang dengan persentase 50%, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 18 orang dengan persentase 47%, sedangkan pada kategori kurang baik berjumlah 1 orang dengan persentase 3%.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Camat Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Bapak Samsuhir pada saat wawancara di rumahnya :

“komunikasi kita lakukan dengan masyarakat selalu baik, kita lakukan berupa lisan serta himbauan dalam surat. Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat kami sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya KTP dan administrasi lainnya. Selain itu semua kegiatan pemberdayaan masyarakat yang kami laksanakan juga kami beri penjelasan kepada masyarakat. Agar masyarakat tahu manfaat dari kegiatan tersebut dan mau ikut berpartisipasi ” (Wawancara, Jam, Hari/Tanggal : 14.00 WIB, Senin, 20 Juni 2022).

Sedangkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti masih kurangnya pemberian informasi dari pihak kecamatan, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya kegiatan dari pemberdayaan masyarakat. Dan masih kurangnya pelayanan dari kecamatan sehingga banyak keluhan dari masyarakat, contohnya dari ribetnya dalam hal pengurusan KTP yang membuat masyarakat kecamatan Balai Jaya banyak yang belum memiliki KTP.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dari wawancara, observasi tersebut dan berdasarkan table V.6 dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Komunikasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dinilai **Cukup Terlaksana** dengan persentase 51% dengan jumlah responden 38 orang.

4. Pertemuan

Pelaksanaan Fungsi Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dapat di ukur salah satunya dengan indikator Pertemuan.

Pertemuan adalah sebuah hanonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Pertemuan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pertemuan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Tabel V.7 Tabel Skor Responden Tentang Pertemuan Terhadap Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir

No	Pertemuan	Tolak Ukur			Total
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Rapat mengenai Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	9	24	5	38
2.	Adanya diskusi antara instansi terkait mengenai Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	14	20	4	38
Jumlah		23	44	9	76
Rata – Rata		11,5	22	4,5	38
		30%	58%	12%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2022

Berdasarkan table V.7 di atas dapat diketahui bahwa jumlah jawaban yang menjelaskan tentang Pertemuan pada Pemberdayaan Masyarakat yang menjelaskan pada pertanyaan pertama kategori baik berjumlah 9 orang dengan persentase 24%, jawaban responden dengan kategori cukup baik berjumlah 24 orang dengan persentase 63%, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 5 orang dengan persentase 13%.

Selanjutnya tanggapan responden terhadap pertanyaan kedua kategori baik berjumlah 14 orang dengan persentase 37%, jawaban responden dengan kategori

Cukup Terlaksana berjumlah 20% dengan persentase 53%, sedangkan jawaban responden dengan kategori kurang baik berjumlah 4 orang dengan persentase 10%.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Camat Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Bapak Samsuhir pada saat wawancara di rumahnya :

“untuk pertemuan selalu kita lakukan secara rutin, biasanya dilakukan setiap bulan pada minggu pertama di aula kantor camat. Semua instansi terkait ikut dalam pertemuan. Di dalam pertemuan biasanya kita membahas tentang progress pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dan apa kendala yang di hadapi semuanya di bahas pada pertemuan tersebut ” (Wawancara, Jam, Hari/Tanggal : 14.00 WIB, Senin, 20 Juni 2022)

Sedangkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan mengenai indikator Pertemuan yaitu pertemuan memang benar dilakukan setiap bulan pada minggu pertama, hanya menurut peneliti pertemuan yang dilakukan belum efektif dan efisien karena tujuan pertemuan yaitu untuk membicarakan dan mendiskusikan hal-hal terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan jika ada kendala yang di hadapi dapat di cari solusinya bersama-sama di dalam pertemuan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dari wawancara, dan Observasi tersebut dan berdasarkan table V.7 dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden tentang Pertemuan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten

Rokan Hilir dinilai **Cukup Terlaksana** dengan persentase 58% dengan jumlah responden 38 orang.

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari keempat indikator yang di gunakan untuk melihat Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Camat Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, maka dapat dibuat rekapitulasi tanggapan responden sebagai berikut :

Tabel V.8 : Rekapitulasi Pelaksanaan Fungsi Camat Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

No	Item Penelitian	Frekuensi Per Kategori			Total
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Perencanaan	17,2 (46%)	18,5 (49%)	2 (5)	38
2.	Pembagian Kerja	14 (37%)	21 (55%)	3 (8%)	38
3.	Komunikasi	11,5 (30%)	22 (58%)	4,5 (12%)	38
4.	Pertemuan	19,5 (51%)	16,5 (43%)	2 (6%)	38
Jumlah		62,2	78	11,5	152
Rata – Rata		16	19	3	38
Persentase		42%	50%	8%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2022

Dari Tabel V.8 tentang Rekapitulasi diatas bahwa jawaban responden yang menjelaskan tentang Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Camat dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dari

Perencanaan, Pembagian Kerja, Komunikasi, dan Pertemuan. Yang dinilai oleh responden dinilai **Cukup Terlaksana** dengan jumlah rata rata 19 dengan persentase 50%. Sehingga dari jawaban responden tersebut dapat diketahui bahwa fungsi camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dinilai Cukup Terlaksana atau maksimal yang diperkuat dengan pengukuran dalam penilaian ini yang menetapkan bahwa rata-rata persentase koordinasi camat dalam pelaksanaan fungsi dinilai pada skor 34 - 66% sehingga dari penilaian yang 50% tersebut, masih dibutuhkan peningkatan kinerja dalam kordinasi yang lebih baik lagi.

Pada Indikator Perencanaan, berdasar hasil Observasi peneliti di lapangan ” Cukup Terlaksana “ karena perencanaan mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat direncanakan setiap awal tahun dan di dalam perencanaan selalu mengikut serta kan kepala desa dan took masyarakat.

Pada Indikator Pembagian, berdasarkan hasil Observasi peneliti di lapangan di nilai “ Cukup Terlaksana” karena Camat apabila melakukan satu kegiatan selalu menagadakan rapat koordinasi bersama tokoh-tokoh masyarakat terutama datuk penghulu, Lurah dan LPM. Dan selalu membagi pembagian kerja dengan mengikut sertakan KASI yang ada. Tetapi dalam hal ini peneliti masih banyak melihat kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Ekonomi dan pelayanan umum belum dapat telaksana dengan baik. Karena seperti yang kita ketahui ekonomi merupakan hal yang paling mendasar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jika masyarakat tidak sejahtera otomatis kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan bisa dikatakan tidak berhasil. Kemudian pemberdayaan masyarakat di bidang pelayan umum mestinya harus di benahi lagi. Agar masyarakat yang memiliki KTP meningkat. Karena KTP merupakan kartu identitas yang harus dimiliki oleh semua warga Negara Indonesia yang sudah berumur 17. Selain itu KTP juga banyak kegunaan dan manfaatnya untuk masyarakat.

Pada Indikator Komunikasi, berdasarkan hasil Observasi peneliti di lapangan di nilai “ Cukup Terlaksana “Seharusnya camat dapat berkoordinasi dengan baik dan menjalin hubungan yang lebih baik lagi kepada para bawahan dan instansi terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Karena komunikasi yang baik akan terhindar dari mis communication. Dan pemberian informasi mengenai kegiatan apa saja yang dilaksanakan di Kecamatan Balai Jaya hendaknya di informasikan kepada masyarakat secara jelas agar masyarakat lain mengetahui kegiatan tersebut.

Kemudian untuk indikator Pertemuan, berdasarkan hasil Observasi peneliti di lapangan peneliti menilai sudah “ Cukup Terlaksana “Item Penilaian yang Terlaksana dengan Baik yaitu camat mengumpulkan instansi terkait untuk membahas persoalan kegiatan pemberdayaan masyarakat, solusi yang dihasilkan dari pertemuan, dan langkah-langkah/strategi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan item penilaian yang Kurang Baik dalam pelaksanaannya yaitu Faktor Penghambat pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Dari penjelasan mengenai observasi peneliti di lapangan berdasarkan per indikator, maka dapat di simpulkan Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir “Cukup Terlaksana”.

C. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Meskipun secara teori dan perancang dalam program pemberdayaan masyarakat sudah tersusun dengan baik, namun dalam setiap melaksanakan suatu rencana seperti pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Balai Jaya tersebut masih terjadi hambatan-hambatan atau kelemahan sehingga menyebabkan rencana yang tersusun tersebut kurang berjalan secara efektif dari perencanaan.

Berbagai faktor penghambat yang dihadapi Camat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Balai Jaya adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat kurang terkoordinasikan dengan baik antara masyarakat dengan pihak-pihak pemerintah kecamatan maupun aparatur desa sehingga masyarakat desa kurang mengetahui mengenai berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat .
2. Kurangnya pengawasan dari pihak kecamatan untuk memantau bagaimana perkembangan yang terjadi di lapangan, sehingga pembagian bantuan

tersebut kurang merata dan program pemberdayaan masyarakat tidak berjalan dengan lancar.

3. Jauhnya jarak Kecamatan dengan kepenghuluan terlalu jauh dan akses jalan juga cukup menghambat kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Cukup Terlaksana. Dalam rangka untuk mendapatkan keberhasilan pelaksanaan fungsi koordinasi Camat disini peneliti menggunakan beberapa tolak ukur yang menjadi acuan berlangsungnya Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, diantaranya yaitu : Perencanaan, Pembagian Kerja, Komunikasi, dan Pertemuan.

Menurut observasi peneliti di lapangan, dapat di simpulkan bahwa indikator penilaian yang dalam pelaksanaannya Cukup Terlaksana yaitu pada indikator perencanaan, karena mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat di rencanakan setiap awal tahun dan di dalam perencanaan selalu mengikut sertakan Kepala Desa, dan Tokoh Masyarakat. Seharusnya camat dapat berkoordinasi dengan baik dan menjalin hubungan yang lebih baik lagi kepada para bawahan dan instansi terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Karena komunikasi yang baik nantinya akan terhindar dari mis communication. Dan pemberian informasi mengenai kegiatan apa saja yang dilaksanakan kecamatan Balai Jaya hendaknya di

informasikan kepada masyarakat desa secara jelas. Dapat dilakukan dengan cara sosialisai dan pemasangan baliho agar dapat di baca oleh semua masyarakat.

Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan hasil penelitian yaitu antara lain:

1. Koordinasi antara instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat hendaknya lebih baik lagi agar terjalinnya komunikasi yang baik sehingga terjalin kerja sama antara Camat, Kepala Desa, LPM, dan masyarakat.
2. Memberikan informasi mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan baik dan lebih jelas lagi. Pemberian informasi dapat dilakukan dengan sosialisai, pemasangan baliho dan pengumuman dengan suara pengeras yang di pasang di mobil. Sehingga mobil bisa keliling ke desa-desa terpencil untuk menyampaikan informasi tersebut.
3. Memberikan sosialisai dan penyuluhan tentang pentingnya memiliki KTP dan mempermudah masyarakat yang mau mengurus KTP tanpa adanya pungli. Dan memberikan pelayanan yang baik kepada semua masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Beddy Iriawan Maksud. 2017. *Dasar-Dasar Admnistrasi Publik*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Miftah Thoha. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer* Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung.
- Hendry Andry dan Tarmizi Yussa. 2015. *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Prof. Dr. Sondang P. Siagian, M.P.A. *Administrasi Pembanguna*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Anggraini, Jum. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2014. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Drs. H. Inu Kencana Syafiiie, M.S.i. *Sistem Admnistrasi Negara* Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Sule, Ernie Tisnawati & Kurniawan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Atmosudirjo, S Prajudi. 2003. *Teori Administrasi*. Jakarta: STIA-LAN Press.
- Drs. Zulkifli, M.Si & Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si. 2014. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru Riau: Marpoyan tujuh Publishing.
- Pasolong, Herbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

sugiyono,. (2016) metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, R&D. Bandung: Alfabeta

Awang, Azam, 2010. Implementasi pemberdayaan pemerintah desa. Yogyakarta. pustaka pelajar

Daryanto, Abdulah, 2013. pengantar ilmu manajemen dan komunikasi. Jakarta

Manulang, 2009. Dasar-Dasar Manajemen. Gajah Mada University Press. Yogyakarta

Siagian, Sondang P, 2006, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi I, Cetakan ke 13, Jakarta: Bumi Aksara

Siagian, Sondang P. 2003. *Filsafat Administrasi* . Jakarta: Bumi Aksara

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta

Pembangunan Berbasis Masyarakat oleh dr. Aprilia Theresia, NTP, M.Si

Pemberdayaan Masyarakat di Era Global oleh Prof. Dr. Haryono Suyono

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspekti Kebijakan Publik oleh Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, M.s

sedarmayanti, 2004. Good Governance(pemerintah yang baik)dalam rangka Otonom Daerah. Bandung. Mandar Maju

Soetomo, Soejono, 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada

Soetomo,2011. Pemberdayaan Masyarakat Akan muncul Antitesisnya, Yogyakarta. Pustaka Pelajar

JURNAL

Alwein Majampoh, Joyce J. Rares, Helly Kolondam. Peranan Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Dokumentasi

Peraturan Pemerintah no 17 tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kecamatan.

UU No 6 tahun 2014 tentang desa

UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 32 tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan

Buku pedoman penyusunan Usulan penelitian (UP), laporan hasil penelitian (Skripsi), dan kertas kerja mahasiswa (KKM), Edisi kedua Revisi 2013. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau